

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship (Stewardship theory)

Donaldson dan Davis (1991) dalam Asih (2021) teori stewardship menggambarkan bahwa tidak ada situasi di mana manajemen termotivasi tujuan pribadi tetapi lebih fokus pada tujuan inti yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofis tentang teori stewardship dibangun atas dasar sifat manusia yaitu, yang dapat dipercaya, memiliki tanggung jawab, mempunyai integritas, dan dapat berlaku jujur. Dengan kata lain, teori stewardship menyatakan bahwa manajemen dapat bertindak untuk kepentingan umum dan terutama investor. Teori ini menjelaskan hubungan yang kuat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi. pencapaian keberhasilan dalam suatu organisasi dapat dicapai melalui maksimalisasi manajemen dan prinsip utilitas dimana setiap tindakan yang dilakukan akan mempengaruhi pendapat pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Hubungan teori stewardship dengan variabel-variabel pada penelitian ini dimana pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga menghasilkan perencanaan yang sebelumnya sudah dibuat dan melaksanakan pengelolaan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengacu pada teori ini. Untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dan eksistensi sebagai lembaga yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah diharapkan dapat mengerahkan seluruh kemampuan dan keahlian yang dimilikinya secara maksimal agar mencapai kualitas laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan kebutuhan para pengguna.

2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₁)

Heru dan Melly (2022:3) “Akuntansi Keuangan Daerah didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran dan pelaporan transaksi ekonomi

(keuangan) suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) digunakan sebagai informasi pengambilan keputusan keuangan bagi pihak yang membutuhkannya”. Dalam Permendagri No.59 Tahun 2007 “Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang handal, relevan dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak pemerintah dan non-pemerintah”.

Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 sistem akuntansi keuangan daerah sekurang-kurangnya meliputi antara lain :

- “1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas;
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas ;
3. Pengeluaran Akuntansi Aset tetap/Barang Milik Daerah;
4. Prosedur Akuntansi selain Kas.”

Indikator sistem akuntansi keuangan daerah menurut (Pujanira 2017) adalah:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi keuangan daerah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku yaitu standar akuntansi berbasis akrual. Basis akrual yaitu mengakui transaksi ketika sudah menjadi hak atau kewajibannya meskipun belum diterima atau dikeluarkan kasnya.
2. Prosedur Pencatatan Akuntansi berdasarkan Standar Pencatatan yang berlaku Umum. Transaksi yang terjadi dilakukan berdasarkan standar pencatatan yang berlaku secara umum. Analisis transaksi dilakukan dalam setiap transaksi keuangan yang terjadi serta harus disertai bukti transaksi dan dicatat secara periodik. Pembuatan Laporan Keuangan secara Periodik. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun secara periodik untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan.

2.1.3 Sistem Pengendalian Internal (X₂)

Martini dkk, (2019) Pengendalian intern merupakan prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk Menjaga operasi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian berisikan rencana organisasi dan metode untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan terpercaya.

Menurut Sitti Mispa (2022) Sistem pengendalian internal suatu organisasi merupakan:

hal yang paling penting dan sangat diperlukan karena kegiatan operasional membutuhkan suatu pedoman khusus untuk membatasi dan mengkoordinasikan setiap kegiatan yang dilakukan. Organisasi, termasuk dewan, memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian kegiatan pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan, adanya sistem pengendalian intern yang baik, maka semua kegiatan khususnya pada bidang keuangan akan berjalan sesuai prosedur sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 mengenai sistem pengendalian internal menjelaskan bahwa:

Salah satu komponen lingkungan pengendalian yang harus diciptakan dan dipelihara untuk menimbulkan perilaku positif dan kondusif dalam penerapan sistem pengendalian interna adalah mewujudkan peran pengawas internal pemerintah yang efektif dan efisien. Tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan sistem pengendalian intern adalah memberikan keyakinan memadai atas keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dengan melakukan sistem Pengendalian internal diharapkan aparat pemerintah dapat bekerja dengan ketaatan, kehematan, keefektifitasan dan efisiensi dalam mencapai tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Serta peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam menjalankan tugas dan fungsi instansi pemerintah, khususnya terhadap transparansi laporan keuangan daerah.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian.
2. Penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian.
4. Informasi dan komunikasi.
5. Pemantauan pengendalian intern.

2.1.4 Kapasitas Sumber Daya Manusia (X₃)

Nurillah (2014) Sumber Daya Manusia adalah pemeran utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengambilan keputusan ada di tangan Sumber Daya Manusia, termasuk penggunaan laporan keuangan untuk kepentingan manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan. Agar dapat menggunakan atau memanfaatkan laporan keuangan sebagai alat

bantu pengambilan keputusan maka dibutuhkan pemahaman mengenai laporan keuangan dan akuntansi. Pemahaman sumber daya manusia mengenai laporan keuangan dan akuntansi akan menjadi faktor pendorong bagi pengguna dan pemanfaat laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Kompetensi sumber daya manusia meliputi kemampuan, yaitu kemampuan seseorang atau individu, organisasi (lembaga) atau sistem dalam memenuhi tugas atau wewenangnya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Sedarmayanti (2014) Kapasitas sumber daya manusia adalah daya yang berasal dari manusia. daya yang berasal dari manusia ini dapat disebut sebagai tenaga atau kekuatan dalam artian dapat ditunjukkan sebagai tenaga, daya, kemampuan, potensi, keberadaan, peran, otoritas, dan tanggung jawab kemampuan (kompetensi), yaitu: Pengetahuan, keterampilan dan, sikap.

2.1.5 Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Keuangan (X₄)

Ariska dkk, (2019) Aplikasi komputer SIMDA keuangan merupakan program aplikasi yang tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Dengan aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi serta pelaporan. Tujuan dari pengembangan program aplikasi sistem informasi manajemen daerah (bpkp.go.id) adalah:

1. Membantu pemerintah daerah dalam membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik, termasuk pengendalian transaksi dan informasi yang memadai.
2. Aplikasi Simda dirancang untuk penggunaan umum atau dapat digunakan oleh semua pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tidak perlu mengembangkan aplikasi serupa dengan sumber daya yang relatif tinggi.
3. Menyediakan database mengenai kondisi keuangan, aset daerah, kinerja daerah, aparatur/perangkat daerah, dan pelayanan umum yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.
4. Menciptakan informasi yang komprehensif, akurat dan tepat bagi pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi semua pihak yang terlibat,
5. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai pengelolaan dan penggunaan teknologi informasi yang lebih baik,

6. Penguatan basis pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

2.1.6 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Rompas (2022) Laporan keuangan memberikan informasi penting mengenai posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk menentukan nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam rangka Pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah, evaluasi kondisi keuangan, evaluasi efisiensi dan efektivitas entitas pelapor, serta membantu menentukan kepatuhannya terhadap peraturannperundang-undangan. Selain itu, pelaporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan informasi yang membantu pengguna untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatakan:

Kualitas laporan keuangan daerah menjadi ukuran-ukuran normatif yang perlu diperhatikan dalam melaporkan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus berkualitas, bermanfaat serta sesuai kebutuhan para pengguna. Informasi berguna ketika informasi tersebut mendukung pengambilan keputusan dan dipahami oleh pengguna.

PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas:

1. Laporan Keuangan (LK)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (L-SAL)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Karakteristik laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sesuai standar pemerintah diatur oleh peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu:

A. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang terkandung di dalamnya bisa mempengaruhi keputusan pengguna yang dapat membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini,

dan prediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Informasi dapat dikatakan relevan jika:

1. Umpan balik yang bermanfaat
dimana informasi yang relevan dapat digunakan oleh pengguna dalam mengevaluasi ekspektasi mereka dimasa lalu.
2. Memiliki manfaat prediktif
Informasi tersebut digunakan untuk membantu pengguna memprediksi masa depan berdasarkan hasil masa lalu dan peristiwa saat ini.
3. tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga efektif dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan.
4. Lengkap
informasi akuntansi keuangan ditampilkan selengkap mungkin berisi semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi keputusan dengan mempertimbangkan keterbatasan apa yang ada.

B. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bersifat bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat diandalkan pengguna disajikan secara jujur sebagaimana mestinya.

Informasi dapat diandalkan jika memenuhi karakteristik berikut:

1. Penyajian yang jujur
informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan harus menggambarkan kejadian serta transaksi yang sebenarnya terjadi.
2. Dapat diverifikasi
informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan dapat diperiksa dan dilakukan oleh berbagai pihak, yang hasilnya menunjukkan kesimpulan tidak terdapat perbedaan yang signifikan.
3. Netralitas
Informasi berdasarkan kebutuhan umum dan tidak mendukung pihak tertentu.

C. Dapat Dibandingkan

Informasi yang terdapat didalam laporan keuangan akan semakin berguna jika bisa dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan yang berasal dari entitas lain secara umum. perbandingan bisa dilaksanakan secara internal dan eksternal. Perbandingan internal bisa dilakukan ketika entitas mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan apabila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan yang sama. dan jika pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada praktik akuntansi yang dilakukan saat ini, perubahan akan diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

D. Dapat dimengerti

Informasi yang tersaji didalam laporan keuangan dapat dipahami oleh Pengguna, isi laporan keuangan disesuaikan dengan batas pemahaman Pengguna.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dan pembanding bagi penulis yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang sejenis tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Ni Kadek Sri Dewi Asih dkk (2021)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada OPD Kabupaten Gianyar	Independen: Kapasitas sumber daya manusia, Implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan implementasi sistem informasi manajemen daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2.	Febryandhie Ananda dkk (2020)	Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Kualitas	Independen: Implementasi Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA)	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Variabel pada penelitian ini yaitu SIMDA berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan

		Laporan Keuangan (Studi Pada Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman)	keuangan Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Keuangan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman (Ha), bahwa responden yakin bahwa dengan menggunakan SIMDA dalam mengelola keuangan daerah dapat membantu meningkatkan kinerjanya dan individu yakin dalam menggunakan sistem akan membantu dia mencapai keuntungan dalam pekerjaannya.
3.	Alysa Media Wulandari (2021)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus: SKPD Kota DKI Jakarta)	Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Kompetensi Sumber Daya Manusia , Sistem Pengendalian Internal Dependen: Kualitas laporan keuangan	1. Hasil uji statistik t variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai signifikansi $0,403 < 0,05$ maka H_1 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Hasil uji statistik t variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi $0,014 > 0,05$ maka H_2 diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara

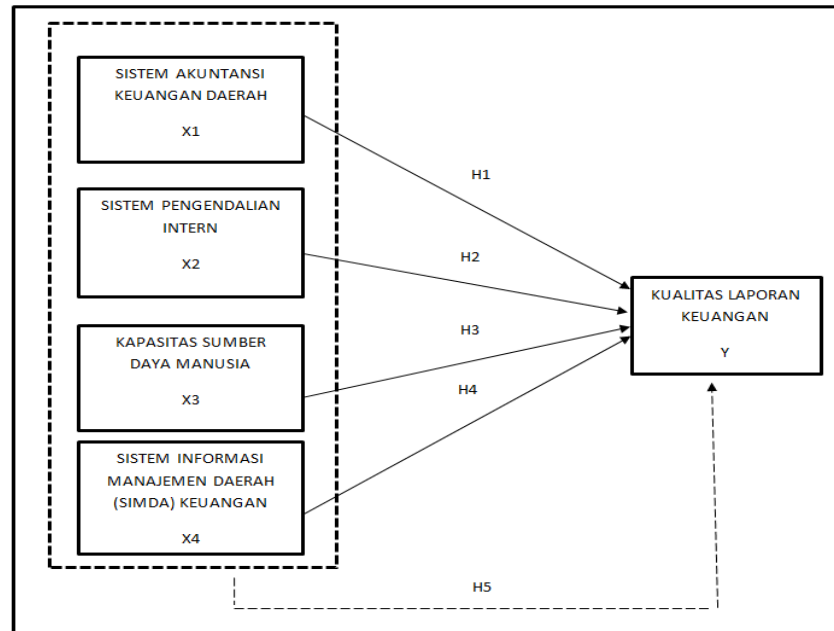
				<p>kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>3. Hasil uji statistik t variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai signifikansi $0,000 > 0,05$ maka H_3 ditolak tetapi dapat berpengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>4. Hasil uji statistik f menunjukkan nilai Fhitung sebesar 40.845, dengan rumus dimana dk penyebut $n-k-1 = 84-3-1 = 80$ dan k adalah 3, maka didapatkan Ftabel sebesar 2.72. Jadi Fhitung $40.845 > Ftabel 2.72$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_6 diterima yang artinya sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem</p>
--	--	--	--	--

				pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
4.	Reza Ilham Putra dkk (2022)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Independen: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	1. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok. 2. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok. 3. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok.
5.	Sri Asyrafil Mustaqmah dkk (2022)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi	Independen Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Sistem Informasi Manajemen Daerah Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	hasil penelitian ini adalah kapasitas sumber daya manusia dan sistem informasi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi, sedangkan sistem informasi manajemen daerah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan.

6.	Anggeraini Oktarida dkk (2019)	Determinants of the Quality Regional Financial Statement	Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Good Governance, Komitmen Organisasional	Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal, Good Governance, dan Komitmen Organisasi, secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dapat diterima. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Good Governance, dan Komitmen Organisasi, secara simultan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dapat diterima.
----	--------------------------------	--	---	--

Sumber: Data Diolah(2023)

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—————> = Uji secara Parsial

- - - - -> = Uji secara Simultan

H₁ = Hipotesis 1

H₂ = Hipotesis 2

H₃ = Hipotesis 3

H₄ = Hipotesis 4

H₅ = Hipotesis 5

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:95) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu rumusan masalah karena masih bersifat sementara, maka harus dibuktikan dengan data empiris yang terkumpul.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat kami tentukan hipotesis penelitian ialah sebagai berikut:

2.4.1 Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pada Permendagri No. 59 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan:

Sistem akuntansi yg terdiri dari seperangkat kebijakan, standar serta prosedur yang digunakan untuk menghasilkan laporan yang andal, relevan dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi berbentuk laporan keuangan yang akan dipergunakan oleh pihak pemerintah serta non-pemerintah pada saat pengambilan keputusan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Sri Dewi Asih dan Ni Putu Trisna Windika Pratiwi (2021) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H1 : Diduga sistem akuntansi keuangan daerah berpegaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2.4.2 Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dijelaskan pada PP No. 60 tahun 2008 Sistem pengendalian intern merupakan “kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan serta pegawai dalam memberikan keyakinan dalam mencapai tujuan organisasi, dimana hal tersebut dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Oktarida, et al. (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H2 : Diduga sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2.4.3 Hubungan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan yang baik diperlukan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dalam akuntansi pemerintah, keuangan, serta organisasi dari pemerintahan. Laporan keuangan yang berkualitas dapat ditentukan dengan penyusunan serta pelaksanaan akuntansi yang dijalankan

sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Disini kapasitas sumber daya sangat berperan penting karena dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan menjalankan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan kemampuan sumber daya tersebut maka laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Asyrafil Mustaqmah, dkk (2022) menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H3 : Diduga kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2.4.4 Hubungan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah, menjelaskan bahwa “Pemerintah Daerah wajib memanfaatkan serta mengikuti perkembangan teknologi informasi, mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, serta transparansi lembaga keuangan daerah”. Dibutuhkan suatu sistem yang baik untuk menunjang kegiatan dalam mengelola keuangan daerah secara akurat (rinci), tepat waktu (on time), transparan serta bertanggung jawab. SIMDA merupakan sistem teknologi yang digunakan untuk menunjang kegiatan tersebut, SIMDA dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sistem tersebut dirancang untuk membantu pemerintah dalam mengelola dan bertanggung jawab terhadap laporan keuangan yang disajikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Sri Dewi Asih dan Ni Putu Trisna Windika Pratiwi (2021) menyatakan bahwa Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H4 : Diduga penerapan sistem informasi manajemen daerah keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2.4.5 Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem Pengendalian Intern, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Akuntansi keuangan daerah merupakan proses identifikasian, pengukuran, serta pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Maka dari itu dibutuhkan pengendalian internal yang baik sehingga menghasilkan laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah penyajian laporan keuangan akan tepat waktu dan relevan. Selain pengendalian internal laporan keuangan yang berkualitas ditentukan oleh bagaimana penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan akuntansi telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku maka dari itu dibutuhkan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten di dalam bidang akuntansi. Kualitas laporan keuangan juga dapat ditingkatkan dengan menerapkan sistem informasi manajemen daerah sehingga mampu meningkatkan kinerja pihak manajemen dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

H5 : Diduga sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), sistem pengendalian intern, kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.